**SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI DALAM PENERTOBAN
ROKOK TANPA CUKAI (ILEGAL) DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS**

Hilma Yulida Rahma
NPP. 32.0442

Asdaf Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: hilmayulidarahma@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ninuk Triyanti, S.H, M.Hum

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The high circulation of excise-free (illegal) cigarettes in Banyumas Regency not only harms state revenues, but also disrupts public order and community protection. **Purpose:** This study aims to analyze the form of synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC) in controlling illegal cigarettes in Banyumas Regency, and to identify obstacles faced in its implementation. **Method:** The study used a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation of relevant informants. Data collection techniques include interviews, documentation, and observations. Data analysis was carried out through the process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used in this study is the strategy theory from Doctoroff (1997). **Result:** The results of the study indicate that the synergy between Satpol PP and KPPBC in controlling illegal cigarettes in Banyumas Regency still faces a number of obstacles such as technical miscommunication at the implementing level, feedback mechanisms that have not been responded to optimally, limited human resources, low transparency of post-operation information, and the less than optimal use of the SIROLEG digital reporting system. The implementation of control still faces obstacles in the form of limited resources, regulations that limit authority, and low public awareness of the dangers of illegal cigarettes. **Conclusion:** Therefore, it is necessary to improve the coordination system and capacity of personnel of both institutions.

Keywords: synergy, control, illegal cigarettes, Satpol PP, Customs

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tingginya peredaran rokok tanpa cukai (ilegal) di Kabupaten Banyumas tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dalam penertiban rokok ilegal di Kabupaten Banyumas, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi,

dan observasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi dari Doctoroff (1997). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan KPPBC dalam penertiban rokok ilegal di Kabupaten Banyumas masih menghadapi sejumlah kendala seperti miskomunikasi teknis di tingkat pelaksana, mekanisme umpan balik yang belum direspon dengan maksimal, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya transparansi informasi pasca-operasi, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem pelaporan digital SIROLEG. Pelaksanaan penertiban masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, regulasi yang membatasi kewenangan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal. **Kesimpulan:** Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem koordinasi dan kapasitas personel kedua institusi.

Kata kunci: sinergitas, penertiban, rokok ilegal, Satpol PP, Bea Cukai

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rokok merupakan salah satu produk yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia, meskipun telah terbukti memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), merokok menyebabkan lebih dari 8 juta kematian setiap tahun, baik akibat konsumsi langsung maupun karena paparan asap rokok oleh perokok pasif. Kementerian Kesehatan (2024) mencatat bahwa kebiasaan merokok turut berkontribusi terhadap stunting dan kematian dini akibat penyakit tidak menular seperti stroke, hipertensi, dan kanker. Dampak ini diperparah dengan munculnya gangguan psikologis dan sosial seperti stres dan depresi, yang turut memengaruhi kualitas hidup masyarakat (Katemba & Winarti, 2024).

Prevalensi merokok di kalangan remaja Indonesia sangat mengkhawatirkan. Data dari *World of Statistics* menunjukkan bahwa 70,5% dari populasi perokok di Indonesia berasal dari kelompok usia muda, yakni 15–19 tahun (56,5%) dan 10–14 tahun (18,4%). Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melaksanakan berbagai langkah preventif, termasuk kampanye kesehatan, kawasan tanpa rokok, serta pengenaan pita cukai pada rokok. Pita cukai tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga alat pengawasan untuk melindungi masyarakat dari konsumsi barang berbahaya. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, fungsi pengawasan seperti ini merupakan manifestasi dari peran negara dalam melindungi masyarakat dari produk yang merugikan secara sistemik (Labolo, 2011).

Sayangnya, peredaran rokok tanpa cukai (ilegal) masih marak di berbagai wilayah. Rokok ilegal umumnya diproduksi tanpa pengawasan kualitas, beredar tanpa pita cukai, dan dijual dengan harga murah, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Pasal 4 ayat 1 UU No. 39 Tahun 2007, rokok yang tidak memiliki pita cukai dikategorikan sebagai produk ilegal. Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menciptakan persaingan tidak sehat bagi industri legal serta meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Perdagangan rokok ilegal tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, namun juga menunjukkan pola sistematis dari upaya industri tembakau untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui studi yang dibiayai sendiri dan praktik lobi, sebagaimana ditemukan di wilayah Uni Eropa dan Inggris (Fooks *et al.*, 2013).

Sebagai langkah strategis, pemerintah melaksanakan operasi gabungan antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024. Operasi gabungan ini tidak hanya bertujuan menindak pelaku peredaran rokok ilegal, tetapi

juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya rokok tanpa cukai (Rahadya, 2022; Sadhali, 2024). Di Kabupaten Banyumas, sinergitas kedua lembaga telah menghasilkan penyitaan jutaan batang rokok ilegal dengan nilai kerugian negara yang signifikan, mencapai lebih dari Rp1 miliar dalam satu tahun.

Meski telah dilakukan berbagai upaya, praktik peredaran rokok ilegal masih terjadi karena adanya hambatan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi teknis, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Posisi strategis Banyumas sebagai daerah lintasan turut memperumit pengawasan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai bentuk sinergitas dan hambatan yang dihadapi antara Satpol PP dan KPPBC dalam penertiban rokok ilegal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan perlindungan masyarakat di tingkat daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena masih maraknya peredaran rokok tanpa cukai (ilegal) di wilayah Kabupaten Banyumas, meskipun berbagai operasi penertiban telah dilaksanakan secara bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas sinergitas antara kedua institusi tersebut dalam upaya penertiban rokok ilegal. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini diarahkan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk sinergitas antara Satpol PP dengan KPPBC dalam menertibkan rokok tanpa cukai (ilegal) di Kabupaten Banyumas, serta apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sinergitas tersebut. Penjabaran atas dua pertanyaan ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika kerja sama lintas sektor dalam konteks penegakan hukum di tingkat daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji sinergitas antarlembaga dalam konteks penertiban rokok ilegal, namun sebagian besar masih berfokus pada wilayah di luar Kabupaten Banyumas, seperti di Provinsi Jawa Timur (Aprilliya dkk., 2023) dan Kota Mataram (Juniasti, 2024). Penelitian-penelitian tersebut cenderung menitikberatkan pada bentuk kolaborasi atau penegakan hukum semata, tanpa mengulas lebih dalam dinamika sinergitas yang melibatkan komunikasi, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas antar lembaga sebagaimana dirumuskan dalam teori sinergitas Doctoroff (1977).

Selain itu, terdapat kesenjangan pada aspek evaluatif. Sebagian besar studi terdahulu belum mengkaji efektivitas sinergitas secara komprehensif, khususnya terkait hambatan struktural, teknis, dan sosial yang dihadapi dalam pelaksanaan operasi penertiban. Dalam konteks Kabupaten Banyumas, belum banyak penelitian yang mengidentifikasi faktor-faktor penghambat sinergitas seperti miskomunikasi antar petugas, keterbatasan SDM, dan belum optimalnya pemanfaatan sistem pelaporan digital.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji sinergitas antara Satpol PP dan KPPBC di Kabupaten Banyumas secara mendalam melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan bentuk kerja sama, tetapi juga menelusuri hambatan yang dihadapi dan bagaimana dinamika interaksi antar lembaga memengaruhi efektivitas penertiban rokok ilegal. Hal ini menjadi kontribusi penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam pengawasan barang kena cukai.

Dengan demikian, kesenjangan penelitian yang coba dijawab melalui penelitian ini terletak pada kurangnya studi yang membahas secara spesifik dan menyeluruh mengenai bentuk sinergitas dan hambatan fungsional antara Satpol PP dan KPPBC dalam konteks daerah perlintasan seperti Kabupaten Banyumas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang lebih relevan dan aplikatif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas koordinasi dan efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok

tanpa cukai. Dalam konteks negara berkembang, efektivitas kebijakan pengendalian tembakau sering kali dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kapasitas kelembagaan yang terbatas dan tingkat literasi masyarakat yang rendah (Hebbar *et al.*, 2022).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sinergitas antarinstansi dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal telah banyak dilakukan, baik dari pendekatan hukum, kebijakan publik, maupun kolaborasi kelembagaan. Penelitian oleh Aprilliya, dkk. (2023) menyoroti bentuk kolaborasi antara Satpol PP Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam penanganan peredaran rokok ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga bersinergi melalui sosialisasi kesadaran hukum dan operasi pengawasan bersama. Namun, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam dampak nyata dari kolaborasi tersebut terhadap penurunan jumlah rokok ilegal, serta belum melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi yang diterapkan. Dalam analisis kebijakan publik, penting untuk memahami bahwa keberhasilan suatu kolaborasi sangat ditentukan oleh sejauh mana proses pengambilan keputusan melibatkan partisipasi aktif antaraktor (Hamdi, 2014).

Penelitian lain oleh Fi'aunillah & Muchtar (2021) mengkaji efektivitas operasi pasar terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC TMP C Tegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan operasi pasar telah berjalan efektif selama tiga tahun terakhir. Namun, penelitian ini belum membandingkan efektivitas operasi pasar dengan pendekatan lain seperti edukasi masyarakat atau penegakan hukum yang lebih ketat, serta belum menguraikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Rahmahengsih (2022) dalam penelitiannya di Kantor Bea dan Cukai Magelang, menelaah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Cukai. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum telah sesuai dengan regulasi, masih ditemukan berbagai kendala, baik dari sisi masyarakat, regulasi, maupun internal lembaga. Namun, penelitian ini belum menawarkan strategi spesifik untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Penelitian oleh Rahmawati dkk., (2019) menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis untuk menganalisis penindakan cukai ilegal di Parepare dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Bea Cukai telah melakukan pengawasan dan penindakan secara masif, namun penelitian ini belum mengeksplorasi pengaruh pendekatan hukum Islam terhadap tingkat kepatuhan masyarakat secara komparatif dengan pendekatan hukum positif yang berlaku umum.

Terakhir, penelitian oleh Juniasti (2024) mengkaji sinergitas antara Satpol PP dan Bea Cukai dalam pemberantasan rokok ilegal di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan menggunakan teori sinergitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa sinergitas belum berjalan optimal karena berbagai kendala. Akan tetapi, penelitian ini belum mengkaji lebih lanjut faktor-faktor eksternal yang memengaruhi efektivitas kerja sama antarinstansi, serta belum merumuskan solusi atas hambatan yang dihadapi.

Berdasarkan telaah terhadap lima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum banyak penelitian yang secara spesifik membahas sinergitas antara Satpol PP dan KPPBC dalam konteks Kabupaten Banyumas. Penelitian sebelumnya juga cenderung belum mengintegrasikan keempat indikator sinergitas menurut Doctoroff, yaitu komunikasi efektif, umpan balik cepat, kepercayaan, dan kreativitas, sebagai alat analisis utama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah melalui fokus wilayah kajian yang spesifik pada Kabupaten Banyumas. Wilayah ini memiliki karakteristik sebagai daerah perlintasan strategis yang belum banyak dikaji dalam konteks penertiban rokok tanpa cukai. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada daerah seperti Jawa Timur, Magelang, Mataram, dan Parepare, sehingga belum menjangkau dinamika lokal di Banyumas, baik dari sisi geografis, birokrasi, maupun kompleksitas sosial yang turut memengaruhi efektivitas sinergitas antarlembaga.

Kebaruan lain dari penelitian ini terletak pada penggunaan teori sinergitas Doctoroff (1977) sebagai alat analisis utama. Berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung menekankan aspek kolaborasi administratif atau penegakan hukum semata, penelitian ini mengintegrasikan empat indikator sinergitas: komunikasi efektif, umpan balik cepat, kepercayaan, dan kreativitas. Keempat indikator tersebut digunakan untuk menilai secara komprehensif bagaimana kualitas hubungan kerja sama antara Satpol PP dan KPPBC dalam upaya menertibkan peredaran rokok ilegal.

Selain mengkaji bentuk sinergi, penelitian ini juga menyoroti secara mendalam berbagai hambatan yang dihadapi dalam praktik pelaksanaan operasi gabungan. Hambatan seperti miskomunikasi teknis, keterbatasan sumber daya manusia, belum maksimalnya sistem pelaporan digital, serta kurangnya respons terhadap umpan balik, belum dijelaskan secara sistematis dalam penelitian-penelitian terdahulu. Analisis terhadap hambatan-hambatan ini memberikan kontribusi praktis bagi evaluasi dan perbaikan mekanisme kerja sama di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan melalui pendekatan yang lebih tajam, kontekstual, dan evaluatif. Tidak hanya mengisi kekosongan studi pada lokasi penelitian yang spesifik, tetapi juga memperluas pemahaman terhadap strategi peningkatan efektivitas sinergitas antarlembaga dalam tata kelola penegakan hukum di daerah. Hal ini menjadikan penelitian ini relevan sebagai rujukan akademis maupun kebijakan di bidang perlindungan masyarakat dan pengawasan cukai.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dalam menertibkan rokok tanpa cukai (ilegal) di wilayah Kabupaten Banyumas.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bentuk sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dalam penertiban rokok tanpa cukai di Kabupaten Banyumas. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk memahami proses, dinamika kerja sama, serta hambatan yang muncul dalam interaksi antarlembaga secara kontekstual dan alami. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan pengalaman para pelaku kebijakan secara langsung.

Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari pejabat struktural dan petugas lapangan pada Satpol PP Kabupaten Banyumas serta KPPBC. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan operasi penertiban rokok ilegal, penyusunan kebijakan teknis, dan koordinasi lintas sektor. Informan ini dipilih karena dianggap paling memahami kebijakan, strategi, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program sinergitas antarlembaga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan dengan panduan semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang fleksibel namun terarah. Pemilihan metode pengumpulan data tersebut didasarkan pada pendekatan metodologi sosial yang menekankan pentingnya memahami realitas dari sudut pandang informan secara mendalam (Nurdin & Hartati, 2018). Observasi dilakukan terhadap kegiatan operasional di lapangan, sementara dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung seperti laporan kegiatan, foto, dan regulasi. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan titik fokus pada area yang menjadi lokasi operasi bersama dan koordinasi antarinstansi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan dalam penelitian ini memaparkan temuan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama pelaksanaan penelitian pada 6 hingga 25 Januari 2025 di Kabupaten Banyumas. Temuan disajikan secara objektif untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan, kemudian dianalisis menggunakan teori sinergitas Doctoroff (1977) sebagai landasan evaluatif. Teori ini digunakan untuk menilai bagaimana hubungan fungsional antara Satpol PP dan KPPBC terbentuk dalam upaya penertiban rokok tanpa cukai. Analisis ini tidak hanya menggambarkan bentuk kerja sama yang terjalin, tetapi juga menilai sejauh mana sinergitas berjalan secara optimal serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

3.1. Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dengan KPPBC dalam Menertibkan Rokok Tanpa Cukai (Ilegal) di Wilayah Kabupaten Banyumas

Sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dalam penertiban rokok tanpa cukai (ilegal) di Kabupaten Banyumas merupakan bentuk kerja sama kelembagaan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.4/2024 dan diperkuat oleh Keputusan Bupati Banyumas Nomor 1134 Tahun 2024. Sinergitas ini diwujudkan melalui pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal yang bertugas mengumpulkan informasi, melaksanakan operasi bersama, menyediakan sarana pendukung, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Operasi dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi, dan hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati serta diteruskan ke KPPBC sebagai bentuk akuntabilitas. Seluruh kegiatan ini didukung oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor 84 Tahun 2024, dengan total pagu anggaran mencapai lebih dari Rp14 miliar. DBHCHT digunakan tidak hanya untuk penertiban, tetapi juga untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur sebagai upaya mengurangi dampak negatif konsumsi tembakau dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang efektif menjadi fondasi utama dalam membangun sinergitas antarlembaga, khususnya antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dalam menertibkan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Banyumas. Dalam konteks ini, komunikasi bukan sekadar proses penyampaian informasi, tetapi juga mencakup pemahaman pesan, kesepahaman tujuan, serta kelancaran alur informasi antarpihak. Efektivitas komunikasi akan

menentukan seberapa baik koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan dapat dijalankan secara bersama.

Terkait indikator pertama, yaitu pesan dapat diterima, ditemukan bahwa penyampaian informasi antara Satpol PP dan KPPBC telah berlangsung melalui rapat koordinasi resmi maupun komunikasi informal seperti grup WhatsApp. Komunikasi ini umumnya berlangsung dua arah dan cukup terbuka, yang memungkinkan kedua pihak menerima pesan terkait pelaksanaan operasi secara jelas dan tepat waktu. Namun, dalam beberapa kondisi, keterlambatan dalam penyampaian surat tugas atau pemberitahuan mendadak masih menjadi kendala minor dalam penerimaan pesan oleh personel teknis di lapangan.

Pada indikator kedua, yaitu pesan disetujui, hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap program dan kebijakan yang dirumuskan bersama hampir selalu mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan ini diperoleh melalui forum rapat gabungan yang membahas teknis kegiatan, termasuk pembagian peran, waktu pelaksanaan, serta lokasi target operasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen bersama dalam menyelaraskan tujuan operasional dan mendukung pelaksanaan kebijakan secara sinergis.

Indikator ketiga adalah tidak ada hambatan dalam melanjutkan pesan. Dalam praktiknya, koordinasi lintas instansi terkadang masih menghadapi hambatan struktural, seperti perbedaan alur birokrasi atau keterbatasan personel yang menghambat penyampaian lanjutan instruksi dari atasan ke tim pelaksana. Meskipun demikian, kedua instansi berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan penyesuaian prosedur dan mempercepat pengambilan keputusan pada saat operasi berlangsung.

Secara keseluruhan, dimensi komunikasi yang efektif antara Satpol PP dan KPPBC di Kabupaten Banyumas sudah terjalin cukup baik. Meskipun masih ditemukan kendala teknis dalam hal pelimpahan informasi secara vertikal maupun horizontal, mekanisme komunikasi yang bersifat terbuka dan responsif menunjukkan bahwa komunikasi antarlembaga ini telah memenuhi sebagian besar indikator efektivitas menurut teori Doctoroff. Hal ini menjadi dasar kuat bagi terciptanya koordinasi operasional yang sinergis dalam penertiban rokok tanpa cukai.

b. Umpan Balik

Umpan balik merupakan elemen penting dalam memperkuat kerja sama kelembagaan karena memungkinkan terjadinya penyesuaian, perbaikan, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dalam konteks sinergitas antara Satpol PP dan KPPBC di Kabupaten Banyumas, mekanisme pemberian umpan balik mencerminkan seberapa efektif komunikasi dua arah dapat berjalan dan sejauh mana informasi hasil pelaksanaan kegiatan dapat direspons secara konstruktif oleh masing-masing pihak. Umpan balik yang jelas, spesifik, dan mudah dimengerti akan mendukung koordinasi serta meminimalisasi kesalahan dalam pelaksanaan operasi gabungan.

Pada indikator pertama, yaitu kejelasan umpan balik, hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan operasi gabungan selalu diikuti oleh proses pelaporan dan penyampaian hasil kegiatan. Laporan disusun secara tertulis oleh tim Satpol PP dan disampaikan kepada Bupati Banyumas, lalu diteruskan kepada KPPBC sebagai bentuk akuntabilitas. Format pelaporan ini memuat data kuantitatif seperti jumlah barang hasil sitaan dan lokasi operasi, serta dokumentasi visual yang memperjelas hasil di lapangan. Dengan format yang baku dan terstruktur, umpan balik yang diberikan dapat dipahami dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan.

Indikator kedua, yaitu penyediaan umpan balik secara aktif, juga telah terlihat dalam evaluasi kegiatan yang dilakukan secara periodik, baik melalui rapat koordinasi

maupun komunikasi tidak formal. KPPBC sebagai mitra utama dalam penindakan sering memberikan masukan terhadap teknis pelaksanaan di lapangan, misalnya mengenai penentuan lokasi rawan atau pola distribusi rokok ilegal. Sebaliknya, Satpol PP juga memberikan tanggapan atas kebutuhan logistik dan dukungan operasional yang perlu diperbaiki. Dinamika umpan balik ini berjalan cukup aktif sebagai wujud kerja sama yang adaptif dan responsif terhadap temuan-temuan terbaru.

Pada indikator ketiga, yaitu spesifikasi umpan balik, ditemukan bahwa meskipun umpan balik bersifat rutin, tidak semua bersifat teknis mendalam. Beberapa respon bersifat umum, misalnya hanya menyampaikan bahwa kegiatan telah sesuai prosedur atau bahwa koordinasi berjalan baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang peningkatan dalam memberikan umpan balik yang lebih detail, khususnya dalam aspek analisis permasalahan dan perencanaan lanjutan agar kegiatan ke depan dapat lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, dimensi umpan balik dalam sinergitas antara Satpol PP dan KPPBC sudah berjalan dengan cukup baik. Kejelasan laporan, keterbukaan dalam menyampaikan masukan, serta keberlangsungan evaluasi bersama menunjukkan bahwa komunikasi dua arah telah terbangun. Meski demikian, untuk mencapai sinergitas yang optimal, diperlukan peningkatan kualitas umpan balik agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut aspek strategis dan teknis yang lebih spesifik.

c. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan elemen kunci dalam membangun hubungan kerja yang sehat dan berkelanjutan antara dua lembaga yang berbeda. Dalam konteks sinergitas antara Satpol PP dan KPPBC di Kabupaten Banyumas, kepercayaan berperan penting dalam menentukan sejauh mana kedua pihak dapat saling mendukung, menghargai peran masing-masing, serta menjalankan tugas tanpa saling mencurigai atau mendominasi. Membangun kepercayaan memerlukan proses yang berkelanjutan, terutama dalam kegiatan lintas kelembagaan yang melibatkan wewenang dan tanggung jawab berbeda. Pemerintah daerah dituntut untuk membangun manajemen kelembagaan yang mampu menciptakan hubungan kerja saling percaya demi efektivitas pelayanan publik (Hamid, 2018).

Kepercayaan antarinstansi tercermin dari pengakuan masing-masing lembaga terhadap kompetensi dan wewenang yang dimiliki. KPPBC menghargai kapasitas Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah yang memahami kondisi sosial dan geografis wilayah Banyumas, sementara Satpol PP juga mengakui otoritas KPPBC dalam penindakan hukum di bidang cukai. Kesalingpengertian ini terlihat dalam pola komunikasi yang tidak hirarkis dan bersifat kolaboratif dalam setiap operasi gabungan.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan bersama secara konsisten dari tahun ke tahun juga menjadi faktor pembentuk kepercayaan. Keberhasilan operasi-operasi sebelumnya memperkuat keyakinan antar pihak bahwa sinergitas ini membawa hasil nyata. Kedua lembaga juga saling terbuka dalam berbagi informasi dan menetapkan sasaran operasi, yang menandakan bahwa tidak ada upaya menutupi kelemahan atau menyembunyikan agenda masing-masing.

Namun demikian, meskipun kepercayaan sudah terbentuk, tantangan tetap ada dalam menjaga konsistensi integritas individu pelaksana di lapangan. Beberapa informan mengungkapkan perlunya pengawasan internal untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan antarlembaga maupun masyarakat terhadap operasi tersebut. Oleh karena itu, pembangunan kepercayaan tidak cukup hanya di tingkat struktural, tetapi juga harus didukung oleh budaya kerja yang jujur dan profesional di seluruh lini.

Secara keseluruhan, dimensi kepercayaan dalam hubungan antara Satpol PP dan KPPBC telah terbentuk secara positif dan menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan penertiban rokok tanpa cukai di Kabupaten Banyumas. Sinergitas yang didasarkan pada saling menghargai fungsi, keterbukaan informasi, dan sejarah kerja sama yang produktif menunjukkan bahwa kepercayaan ini tumbuh seiring waktu dan menjadi kekuatan utama dalam mendukung keberlanjutan kerja sama lintas sektor.

d. Kreativitas

Kreativitas dalam sinergitas antarlembaga tidak hanya diartikan sebagai penciptaan hal-hal baru, tetapi juga mencakup kemampuan berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan operasional. Dalam konteks kerja sama antara Satpol PP dan KPPBC di Kabupaten Banyumas, kreativitas tercermin dari usaha kedua pihak dalam mengembangkan strategi, metode, dan alat bantu untuk meningkatkan efektivitas penertiban rokok tanpa cukai. Dimensi ini menjadi penting karena masalah peredaran rokok ilegal terus berkembang dengan pola yang semakin kompleks.

Salah satu wujud kreativitas yang muncul adalah pembentukan Tim Satgas yang melibatkan berbagai elemen, tidak hanya dari Satpol PP dan KPPBC, tetapi juga dari perangkat daerah dan masyarakat. Pendekatan ini menciptakan kombinasi kekuatan baru yang tidak hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga upaya pencegahan berbasis edukasi dan pemantauan sosial. Strategi ini menunjukkan adanya inovasi dalam mengintegrasikan berbagai fungsi dan sumber daya yang ada di daerah.

Selain itu, pemanfaatan teknologi juga menjadi indikator penting dalam dimensi kreativitas. Penerapan aplikasi SIROLEG (Sistem Informasi Rokok Ilegal) sebagai media pelaporan dan pemetaan sebaran peredaran rokok ilegal merupakan langkah maju dalam mendukung transparansi dan efisiensi operasional. Aplikasi ini membantu Tim Satgas mengidentifikasi titik-titik rawan dan mempermudah pelaporan hasil operasi secara digital, yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memakan waktu.

Kreativitas juga tampak dalam penyusunan kampanye edukatif yang bersinergi dengan kegiatan kebudayaan dan sosialisasi publik, seperti penyebaran informasi melalui media sosial, baliho, dan siaran radio lokal. Upaya ini menunjukkan bahwa sinergitas tidak semata-mata berfokus pada tindakan represif, tetapi juga memanfaatkan pendekatan kultural untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dengan demikian, dimensi kreativitas dalam sinergitas antara Satpol PP dan KPPBC di Kabupaten Banyumas telah berjalan dengan baik melalui inovasi kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan komunikasi publik yang adaptif. Kreativitas ini menjadi bukti bahwa kerja sama lintas sektor tidak stagnan, melainkan terus berkembang dalam menghadapi dinamika peredaran rokok ilegal secara lebih integratif dan solutif.

Hambatan dalam pelaksanaan sinergitas antara Satpol PP dan KPPBC di Kabupaten Banyumas mencerminkan tantangan nyata yang berkaitan erat dengan dimensi komunikasi dan umpan balik. Meskipun koordinasi formal telah terbangun, masih ditemukan kendala teknis di lapangan, terutama dalam hal alur pelaporan dan kejelasan titik koordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa pesan belum sepenuhnya dapat diterima dan diteruskan secara merata, sehingga menimbulkan miskomunikasi dalam pelaksanaan operasi. Selain itu, umpan balik yang diberikan melalui sistem pelaporan SIROLEG masih bersifat normatif dan minim evaluasi strategis, menandakan belum terpenuhinya indikator umpan balik yang jelas, spesifik, dan mudah dimengerti.

Hambatan lainnya muncul dari keterbatasan sumber daya manusia dan perbedaan fokus kerja antara kedua instansi. Satpol PP kerap menghadapi beban kerja yang tumpang tindih

dengan agenda prioritas daerah, sementara KPPBC memiliki cakupan pengawasan yang sangat luas. Keterbatasan ini menghambat konsistensi pelaksanaan operasi gabungan dan secara tidak langsung memengaruhi kepercayaan antarlembaga. Satpol PP merasa kurang mendapatkan transparansi atas tindak lanjut hukum oleh KPPBC, terutama terkait status barang bukti dan pelaku. Ketidakjelasan ini berdampak pada menurunnya kepercayaan, salah satu dimensi penting dalam menjaga kelangsungan sinergitas kelembagaan yang efektif.

Terakhir, pada aspek kreativitas, hambatan terlihat dalam implementasi inovasi sistem SIROLEG yang belum optimal. Rendahnya literasi digital masyarakat dan belum meratanya sosialisasi sistem ini menghambat partisipasi publik dalam pelaporan rokok ilegal. Bahkan di internal lembaga, SIROLEG belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat reflektif dan strategis untuk mendukung evaluasi bersama. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi yang ada belum sepenuhnya diintegrasikan sebagai bagian dari pola kerja kreatif lintas lembaga. Dengan demikian, untuk mencapai sinergitas yang optimal, perlu ada perbaikan menyeluruh di setiap dimensi sinergitas, baik dalam komunikasi, umpan balik, kepercayaan, maupun kreativitas.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyumas dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dalam penertiban rokok tanpa cukai mencakup empat dimensi penting: komunikasi efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas. Evaluasi terhadap sinergitas kebijakan antarlembaga idealnya menggabungkan pendekatan teoritik, legalistik, dan empirik agar analisis yang dihasilkan bersifat menyeluruh (Simangunsong, 2019). Sama halnya dengan temuan penelitian Juniasti (2024), sinergitas antarinstansi memerlukan pola komunikasi yang jelas dan mekanisme kerja sama yang sistematis. Namun, penelitian ini menyoroti bahwa di Banyumas, meskipun komunikasi struktural berjalan baik, masih terdapat hambatan teknis di lapangan, seperti miskomunikasi antarpetugas dan kurangnya kejelasan alur koordinasi saat operasi berlangsung. Hal ini berbeda dengan temuan Juniasti yang lebih menekankan persoalan struktur kelembagaan daripada dinamika pelaksana teknis di lapangan.

Dalam hal umpan balik dan kepercayaan, hasil penelitian ini memperkuat temuan Aprilliya dkk. (2023) yang menyatakan bahwa sinergi akan berjalan lebih efektif apabila terdapat kesalingpercayaan dan evaluasi kegiatan secara berkala. Penelitian ini menambahkan bahwa meskipun laporan hasil operasi telah disampaikan secara tertulis, namun sering kali bersifat normatif dan tidak memberikan rekomendasi taktis yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini berbeda dengan temuan Fi'aunillah & Muchtar (2021), yang menyebut bahwa keberhasilan sinergi diukur dari hasil operasi saja tanpa mengulas proses evaluatif yang menyertainya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan antarlembaga dapat terkendala jika transparansi tindak lanjut hasil operasi tidak disampaikan secara terbuka, terutama mengenai status barang bukti dan pelaku.

Sementara itu, pada aspek kreativitas, penelitian ini mengungkap bahwa pemanfaatan aplikasi SIROLEG sebagai inovasi pelaporan digital masih belum maksimal, baik dari sisi internal kelembagaan maupun dari partisipasi masyarakat. Temuan ini menolak kesimpulan Rahmahnengsih (2022) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan dan pengawasan di daerah sudah berjalan baik, karena pada konteks Kabupaten Banyumas masih ditemukan rendahnya literasi digital dan minimnya pemanfaatan SIROLEG sebagai alat reflektif dalam evaluasi strategis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kebaruan dengan menggabungkan pendekatan evaluatif dan kontekstual terhadap pelaksanaan sinergitas lintas sektor, sekaligus menggarisbawahi pentingnya penyesuaian strategi sinergi terhadap kondisi sosial dan teknologi lokal. Selain itu, tren global menunjukkan bahwa perdagangan rokok ilegal berkembang secara adaptif dan lintas batas, sehingga memerlukan respons kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga kolaboratif dan berbasis data (Paraje *et al.*, 2022).

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah adanya dukungan regulatif yang kuat sebagai faktor pendukung sinergitas antara Satpol PP dan KPPBC. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.4/2024 dan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 1134 Tahun 2024 menjadi dasar hukum yang memperjelas pembagian peran dan membentuk tim satuan tugas (satgas) penertiban rokok ilegal. Keberadaan regulasi ini tidak hanya memperkuat legalitas tindakan, tetapi juga meningkatkan legitimasi operasional tim gabungan di mata publik dan lembaga lain.

Temuan menarik lainnya adalah peran pengalaman operasional dan personel yang adaptif dalam menjaga kesinambungan sinergitas. Beberapa informan menyebut bahwa keterlibatan personel yang sudah sering mengikuti operasi sebelumnya membuat proses koordinasi lebih lancar dan minim konflik. Faktor ini memperkuat aspek kepercayaan dan fleksibilitas kerja tim, meskipun terdapat keterbatasan jumlah personel di tengah padatnya agenda dinas masing-masing.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan rendahnya partisipasi masyarakat sebagai hambatan tersendiri. Meskipun program edukasi dan sosialisasi telah dijalankan, tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan konsekuensi hukum peredaran rokok ilegal masih tergolong rendah. Hal ini berdampak pada minimnya laporan sukarela dan keengganan masyarakat menggunakan sarana pelaporan seperti SIROLEG. Kesenjangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun sinergitas yang partisipatif dan berbasis komunitas. Kolaborasi antarlembaga yang efektif juga bergantung pada inovasi model tata kelola yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan menjunjung prinsip keterbukaan, partisipasi, serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan (Temitope, 2023).

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dalam penertiban rokok ilegal di Kabupaten Banyumas telah terbangun dalam kerangka kerja sama lintas kelembagaan yang cukup solid. Berdasarkan teori sinergitas Doctoroff (1977), secara umum keempat dimensi (komunikasi yang efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas) telah terwujud, meskipun masih terdapat sejumlah hambatan yang mengurangi efektivitas pelaksanaannya.

Dari sisi komunikasi, koordinasi antarinstansi berjalan cukup baik secara struktural, namun masih terdapat kendala teknis di lapangan yang menghambat distribusi informasi secara merata. Umpan balik yang diberikan melalui sistem pelaporan seperti SIROLEG sudah rutin dilakukan, namun belum spesifik dan kurang ditindaklanjuti secara strategis. Dimensi kepercayaan juga telah terbentuk melalui pengakuan fungsi masing-masing lembaga dan sejarah kerja sama yang konsisten, tetapi masih perlu ditingkatkan melalui transparansi tindak lanjut hukum pasca-operasi. Sementara itu, dari sisi kreativitas, upaya inovatif seperti pembentukan tim satgas lintas sektor dan pemanfaatan aplikasi SIROLEG menjadi langkah maju, namun implementasinya belum optimal karena hambatan digital dan keterbatasan pemanfaatan sebagai alat evaluasi.

Dengan demikian, sinergitas yang dibangun telah memberikan dasar kuat dalam upaya pemberantasan rokok ilegal di tingkat daerah, tetapi masih memerlukan perbaikan di berbagai aspek teknis dan strategis. Peningkatan komunikasi lapangan, umpan balik yang lebih tajam, penguatan kepercayaan melalui keterbukaan informasi, serta optimalisasi inovasi berbasis teknologi menjadi langkah penting dalam memperkuat efektivitas sinergitas ke depan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, keterbatasan waktu pelaksanaan yang singkat membatasi ruang observasi terhadap

dinamika operasional Satpol PP dan KPPBC secara menyeluruh. Kedua, jumlah dan cakupan informan yang terbatas dapat mempengaruhi keberagaman perspektif yang diperoleh, terutama dari pelaksana teknis dan pemangku kebijakan lainnya. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data sensitif serta belum optimalnya implementasi sistem pelaporan SIROLEG juga membatasi analisis yang lebih mendalam terhadap efektivitas inovasi tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian ini bersifat kontekstual dan diharapkan dapat dilengkapi oleh studi lanjutan dengan pendekatan waktu yang lebih panjang dan cakupan informan yang lebih luas.

Arah Masa Depan Penelitian: Arah masa depan penelitian ini dapat difokuskan pada pengkajian yang lebih mendalam terhadap efektivitas penggunaan teknologi informasi seperti SIROLEG dalam mendukung pelaporan dan evaluasi kegiatan penertiban rokok ilegal, termasuk integrasinya dengan partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan lebih banyak instansi pendukung dan menggunakan pendekatan waktu yang lebih panjang untuk melihat dinamika sinergitas secara berkelanjutan. Pendekatan metode campuran (*mixed methods*) juga dapat digunakan untuk memperkuat validitas data serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Banyumas atas dukungan, izin, dan kerja sama selama proses penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh informan, termasuk pejabat struktural, staf pelaksana, serta anggota Tim Satgas yang telah berpartisipasi dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang relevan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penguatan sinergitas antarlembaga dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Banyumas.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aprilliya, A. D., Kamariyah, S., & Mustofa, A. (2023). Kolaborasi antar Aktor dalam Penanganan Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Jawa Timur. *Soetomo Administrasi Publik*, 5(2), 501-512.
<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/download/7265/3412>
- Doctoroff, W. H. (1977). *Strategy and the structuring of organizations*. New York: McGraw-Hill.
- Fi'aunillah, M. H., & Muchtar, M. (2021). Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal? *Info Artha*, 5(2), 118-129.
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/view/1278>
- Fooks, G. J., Peeters, S., & Evans-Reeves, K. A. (2013). Illicit trade, tobacco industry-funded studies and policy influence in the EU and UK. *Tobacco Control*, 23(1).
<https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2012-050788>
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.
- Hebbar, P. B., Dsouza, V., Bhojani, U., Prashanth, N. S., van Schayck, O. C. P., Babu, G. R., & Nagelhout, G. E. (2022). How do tobacco control policies work in low-income and middle-income countries? A realist synthesis. *BMJ Global Health*, 7(11), e008859.
<https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-008859>
- Juniasti, N. P. (2024). *Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara*

- Barat (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
<http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19054>
- Katempa, Y., & Winarti, E. (2024). Analisis Perilaku Merokok dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas: Pendekatan Berdasarkan Teori Perubahan Perilaku (Theory of Planned Behavior-Tpb) Dan Teori Kecenderungan Perilaku (THEORY OF REASONED ACTION-TRA): LITERATURE REVIEW. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(2), 3788-3808.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/28498>
- Kementerian Kesehatan. (2024). "Perokok Aktif Di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda." <https://search.app/5jtPmm87SG7X2AEU6> (Diakses pada 3 November 2024)
- Labolo, M. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Paraje, G., Stoklosa, M., & Blecher, E. (2022). Illicit trade in tobacco products: Recent trends and coming challenges. *Tobacco Control*, 31(2), 257–262.
<https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2021-056557>
- Rahadya. (2022). "Satpol PP Kota Cimahi Ikut Perangi Peredaran Rokok Ilegal". Indonesia Kini. <https://indonesiakini.go.id/berita/9317988/satpol-pp-kota-cimahi-ikut-perangi-peredaran-rokok-ilegal> (Diakses pada 11 November 2024)
- Rahmahnengsih, N. S. (2022). Skripsi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran RokokI legal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang. https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12931
- Rahmawati, R., Hardianto, H., & Cahya, A. (2019). Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 4(1), 65-87.
<https://doi.org/10.24256/alw.v4i1.1811>
- Sadhali. (2024). "Satpol PP dan WH Aceh Besar Gelar Sosialisasi Penegakan Hukum". RRI. <https://rri.co.id/daerah/901544/satpol-pp-dan-wh-aceh-besar-gelar-sosialisasi-penegakan-hukum> (Diakses pada 8 Desember 2024).
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: Alfabeta.
- Temitope, T. (2023). Investigating innovative models of governance and collaboration for effective public administration in a multi-stakeholder landscape. *International Journal Papier Public Review*, 4(2), 18–28. <https://doi.org/10.47667/ijppr.v4i2.209>